

PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

Influence of Investment and Labour on Poverty in South Sulawesi

Novita Wulandari¹, Agussalim², Retno Fitriani³

¹Mahasiswa Program Sarjana
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin;
novitawulandari96@gmail.com

² Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin;
agus.jerox@gmail.com

³ Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin.

Keywords: Investment, Labour,
Economic growth, Poverty

Kata kunci: Investasi, Tenaga kerja,
Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan

Abstract

Poverty is one of the benchmarks of socio-economic conditions in assessing the successful development of Governments in a region and is a condition involving inability to meet the most demanding demands of life. The study aims to analyse indirect investment influence on poverty through economic growth and to analyze the indirect influence of poverty through economic growth in South Sulawesi. This research uses secondary data in the form of time series, 2002-2018 namely investment data (PMA and PMDN), manpower, PDRB, and poverty. The analytical method used is Two Stage Least Square with four research variables namely; x1 (investment), x2 (labor), y1 (economic growth), y2 (poverty). The results showed that the effect of investment did not affect poverty through economic growth while labor affected poverty through economic growth.

Abstrak

Kemiskinan adalah salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah dan merupakan suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan menganalisis pengaruh tenaga kerja secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series, 2002-2018 yaitu data investasi (PMA dan PMDN), tenaga kerja, PDRB, dan kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah Two Stage Least Square dengan empat variabel penelitian yakni; x1 (investasi), x2 (tenaga kerja), y1 (pertumbuhan ekonomi), y2

(kemiskinan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sementara tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari kemiskinan, antara lain menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Saputra, 2011). Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, dimana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kondisi masyarakat yang hidup dalam jeratan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai (Jonaidi, 2012).

Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan

produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2006).

Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total suatu daerah. Tingkat kemiskinan erat hubungannya dengan disparitas kemiskinan suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2017).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan (2014-2018)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase (%)
2014	8.432.163	806.350	9,54
2015	8.520.304	797.720	9,39
2016	8.606.375	807.040	9,40
2017	8.690.294	813.070	9,38
2018	8.771.970	792.640	9,06

Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2014-2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin 806.350 jiwa dari total penduduk 8.432.163 jiwa kemudian menurun dan meningkat kembali pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017 dari total jumlah penduduk 8.690.375 jiwa dengan jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 813.070 jiwa. Adapun peningkatan penduduk miskin ditandai dengan meningkatnya beberapa kelompok komoditi makanan yaitu beras dan rokok kretek filter serta dari kelompok bukan makanan yaitu perumahan, inilah yang menyebabkan pada tahun 2017 penduduk miskin meningkat kembali. Hal ini terjadi atas dasar besar kecilnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Pasalnya, memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 792.640 jiwa dengan persentase 9,06 persen, hal ini terjadi tidak lepas dari kondisi perekonomian yang sangat baik dan keadaan ketenagakerjaan yang mendukung serta terkendalinya harga-harga.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik namun angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang cukup tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan Mankiw (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi dengan peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS (2019) seperti terlihat ditabel 1 dimana penduduk dengan keadaan miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 792.640 jiwa. Angka ini setara dengan 9,06 persen dari total penduduk yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan. BPS (2018) menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari pengeluaran. Artinya, orang yang pengeluarannya di bawah angka rata-rata garis kemiskinan termasuk warga miskin. Rasio gini pada tahun 2018 adalah 0,389. Angka ini turun dari rasio gini setahun lalu pada tahun 2017 sebesar 0,391. Hal ini seolah-olah turun namun sebenarnya semu. Angka kemiskinan memang tidak berasal dari jumlah pemasukan tapi dari pengeluaran. Diduga orang kaya menahan belanjanya karena khawatir dengan ketidakpastian kondisi ekonomi makro sementara pengeluaran masyarakat kelas bawah didorong oleh bantuan sosial dan bantuan beras yang jumlahnya naik secara signifikan.

Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Keberadaan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih relatif besar, dapat menegaskan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara masif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin. Didukung pula bahwa penurunan jumlah penduduk miskin dikarenakan adanya penurunan angka kemiskinan yang hanya berlangsung di wilayah perkotaan saja. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan dari wilayah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi tidak terlalu memberi dampak terhadap penduduk miskin di desa hanya dinikmati di wilayah perkotaan saja sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok penduduk menengah-atas yang berada di perkotaan.

Kemiskinan merupakan keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Salah satu penyebab tingginya kemiskinan adalah rendahnya kualitas SDM (Sulistyowati, 2011). Tingkat kemiskinan dapat bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah dan mempengaruhi tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatannya, demikian seterusnya berputar tanpa ada ujung pangkalnya.

Bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan yang tidak disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan fenomena kemiskinan seperti anak jalanan, pengemis dan geng motor. Fenomena inilah yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan banyak pemuda-pemudi yang bekerja tidak sesuai dengan seharusnya. Dimana pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai yang seharusnya yaitu seperti melakukan pekerjaan menjadi pengemis/pengamen dimana mereka sebenarnya masih mempunyai fisik kuat untuk mencari pekerjaan yang layak. Selanjutnya ia mengerjakan pekerjaan yang meresahkan masyarakat (tindakan kriminal) seperti yang banyak terjadi yaitu begal dimana mereka melakukan hal tersebut karena faktor lingkungan dan tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya sehingga pekerjaan tersebut untuk menutupi kebutuhannya.

Peranan para pelaku ekonomi tidak pernah lepas dalam menyejahterakan masyarakat dari jerat kemiskinan dan kemajuan ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian (Gravitiani, 2006). Sebagaimana Sukirno (2001) berpendapat bahwa teori ekonomi dan investasi

merupakan komponen penting dalam pengeluaran agregat. Investasi dalam bidang perekonomian dapat berpengaruh serta mendorong naik turunnya tingkat perekonomian dari suatu negara, kondisi ini terjadi karena dengan adanya investasi maka akan terjadi peningkatan produksi dan kesempatan kerja.

Bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan yang tidak disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan fenomena kemiskinan seperti anak jalanan, pengemis dan geng motor. Fenomena inilah yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan banyak pemuda-pemudi yang bekerja tidak sesuai dengan seharusnya. Dimana pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai yang seharusnya yaitu seperti melakukan pekerjaan menjadi pengemis/pengamen dimana mereka sebenarnya masih mempunyai fisik kuat untuk mencari pekerjaan yang layak. Selanjutnya ia mengerjakan pekerjaan yang meresahkan masyarakat (tindakan kriminal) seperti yang banyak terjadi yaitu begal dimana mereka melakukan hal tersebut karena faktor lingkungan dan tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya sehingga pekerjaan tersebut untuk menutupi kebutuhannya.

Peningkatan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi juga mempunyai peranan yang penting di dalam peningkatan tenaga kerja. Dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Investasi PMA dan PMDN serta Tenaga Kerja Sulawesi Selatan (2014-2018)

Tahun	Investasi		Total Investasi PMA dan PMDN	Tenaga Kerja (Jiwa)
	PMA (Rupiah)	PMDN (Rupiah)		
2014	3.338.356.050	49.495.468	3.387.851.518	3.527.036
2015	3.139.653.414	921.532.660	4.061.186.074	3.485.492
2016	4.965.361.675	3.334.600.000	8.299.961.675	3.694.712
2017	9.551.520.000	1.969.400.000	11.520.920.000	3.598.663
2018	8.270.319.356	3.275.876.300	11.546.195.656	3.725.029

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan BPS Sulawesi Selatan (2014-2018)

Dari data diatas menunjukkan bahwa investasi PMA dan PMDN di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang tentu saja juga memberikan pengaruh terhadap tenaga kerja. Seperti terlihat pada tahun 2016, nilai total investasinya sebesar Rp 8.299.961.675 meningkat menjadi Rp 11.520.920.000 di tahun 2017 atau naik sebesar Rp 3.220.958.329 dimana jumlah investasinya mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan tenaga kerjanya. Ini adalah salah satu masalah dalam penelitian ini karena di dalam teori Keynes dikatakan bahwa apabila investasi mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan.

Tetapi, kenyataan di lapangan berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes tersebut. Pada tahun 2018 total investasi meningkat kembali menjadi Rp 11.546.195.656 hal ini ditandai dengan kinerja ekonomi yang cukup baik.

Selain adanya investasi yang akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan suatu daerah adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi tersebut (Sagir, 2000). Tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang berkualitas tinggi dapat memberikan inovasi yang akan mempermudah kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas (Todaro, 2006).

Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal yang secara akumulatif memiliki nilai investasi dan output atau produksi yang lebih besar dan selanjutnya dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Investasi merupakan salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000).

Golongan angkatan kerja ini adalah modal sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor produksi diproses ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi baiknya mampu melibatkan secara aktif golongan angkatan kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja dipasar kerja sebaiknya mampu diserap dan digunakan dalam berbagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Sulawesi Selatan (Sumarsono, 2003).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab permasalahan berikut. Pertama, Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?. Kedua, Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Estimasi analisis dan penelitian dilakukan dengan menggunakan data time series (tahunan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018) di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Realisasi Investasi, dan Tenaga Kerja dari Proyek PMDN yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Sektor Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Realisasi Investasi, dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Sektor Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui literatur yang berkaitan dengan obyek studi baik itu berupa buku statistik yang ada di BPS, jurnal dan artikel yang masih relevan dengan penelitian ini.

Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Diduga tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi

Untuk mengetahui pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi maka akan dianalisis dengan menggunakan regresi Two Stage Least Square (2SLS). 2SLS merupakan suatu teknik statistik yang menggunakan analisis persamaan struktural. Teknik ini digunakan ketika galat variabel dependen berkorelasi dengan variabel independen. 2SLS digunakan ketika suatu kasus dimana terdapat korelasi antara error yang dihasilkan dalam suatu model berkorelasi dengan variabel bebas. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kemiskinan, variabel eksogen adalah investasi dan tenaga kerja, variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi.

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2) \dots\dots\dots (3.1)$$

$$Y_2 = f(Y_1) \dots\dots\dots (3.2)$$

Adapun persamaan non linier adalah sebagai berikut: $e^{Y_1} = \alpha X \alpha_1$

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1 \dots\dots\dots (3.3)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \mu_2 \dots\dots\dots (3.4)$$

$$\ln Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1) + \mu_2 \dots\dots\dots (3.5)$$

Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika, maka akan diperoleh persamaan “*reduced form*” sebagai berikut:

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1\alpha_0 + \beta_1\alpha_1\ln X_1 + \beta_1\alpha_2\ln X_2 + \beta_1\mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_1\alpha_0) + (\beta_1\alpha_1\ln X_1 + \beta_1\alpha_2\ln X_2) + (\beta_1\mu_1 + \mu_2)$$
$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_1\alpha_0) + \ln X_1 (\beta_1\alpha_1) + \ln X_2 (\beta_1\alpha_2) + (\beta_1\mu_1 + \mu_2)$$

$$Y_2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \mu \dots \dots \dots (3.6)$$

Keterangan:

- Y1 : Pertumbuhan Ekonomi
- Y2 : Jumlah Orang Miskin
- X1 : Nilai Investasi
- X2 : Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja
- $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$: Intersep
- $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- μ_1, μ_2 : *Error Term*
- γ_1 : Parameter yang akan diestimasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non-makan dengan membandingkan tingkat konsumsi penduduk terhadap garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Kemiskinan memiliki ciri yaitu tingkat kepemilikan lahan kecil, kurangnya akses terhadap sumber permodalan, hidup dibawah garis kemiskinan dengan konsumsi per hari kurang dari 2.100 kilo kalori, kondisi papan tidak sehat, akses lemah terhadap air bersih, pendidikan dan kesehatan, rentan perubahan harga kebutuhan pokok, dan sangat tergantung terhadap sumber makanan yang langsung diperoleh dari alam.

Berdasarkan definisi di atas, tidak mengherankan jika musuh terbesar umat manusia adalah kemiskinan. Tidak berlebihan juga jika semua pemerintahan pada level manapun di seluruh dunia menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda pemerintahannya. Sama seperti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan

persoalan kemiskinan sebagai fokus utama untuk mereka tuntaskan. Berikut Tabel 4.1 jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan tahun 2002-2018.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan Tahun 2002-2018

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)
2002	1.309.000
2003	1.301.800
2004	1.241.500
2005	1.280.600
2006	1.112.000
2007	1.083.400
2008	1.031.400
2009	963.600
2010	913.400
2011	832.230
2012	812.270
2013	863.230
2014	806.350
2015	797.720
2016	807.030
2017	813.070
2018	792.630

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun (2002-2018)

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012-2018 mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 dikarenakan adanya penurunan angka kemiskinan yang hanya berlangsung di wilayah perkotaan saja. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin meningkat kembali disebabkan bahwa adanya peningkatan angka kemiskinan dari wilayah pedesaan. Sejatinya penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahun dipengaruhi oleh adanya penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan saja tetapi tidak untuk di wilayah pedesaan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk miskin dan tidak terlepas dari adanya program pengentasan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan merupakan dampak positif dari sejumlah program pemerintah yang selama ini dilaksanakan diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, Biaya Operasional Sekolah, Kelompok Usaha Bersama, Program Keluarga Harapan, Asuransi Kesejahteraan Sosial, perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan panti asuhan. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk miskin ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi tidak memberi dampak terhadap penduduk miskin di wilayah pedesaan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok penduduk menengah-atas yang ada di wilayah perkotaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Sebagaimana dalam kurun waktu 2002-2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan laju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor yang menggambarkan tingkat perubahan yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, disajikan melalui PDRB atas harga konstan. Penggunaan angka atas harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2018

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2002	4.08
2003	5.42
2004	5.26
2005	6.05
2006	6.72
2007	6.34
2008	7.78
2009	6.23
2010	8.19
2011	8.13
2012	8.87
2013	7.62
2014	7.54
2015	7.19
2016	7.42
2017	7.23
2018	7.07

Sumber: BPS (2002-2018)

Pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013-2018 tren pertumbuhan ekonomi menurun akan tetapi tidak menjadi sebuah masalah, hal ini terjadi dikarenakan perekonomian di Sulawesi Selatan tumbuh secara baik dikisaran 7,00 persen per tahun. Pencapaian ini tidak hanya melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,50 persen per tahun) tetapi juga menempatkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus kawasan paling dinamis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan usaha dalam menaikkan output perkapita dalam masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Kenaikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif dari sejumlah program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan cara meningkatkan produksi barang-barang dalam negeri yang

menambah pendapatan negara, adanya sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan bertambah banyaknya sumber daya manusia para pengelola akan berdatangan dan itu berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sumber daya yang ada.

Adapun yang menyebabkan tren pertumbuhan ekonomi menurun yaitu dapat dilihat dari sisi sektor perdagangan. Dimana, perekonomian yang bertumpu pada perdagangan berpotensi mendorong nilai mata uang yang tidak stabil, mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi, menurunkan tingkat produktivitas dan memperbesar defisit perdagangan.

Investasi

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Dengan letak strategis ditengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi. Kegiatan investasi di Sulawesi Selatan merupakan pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah. Karena itu, investasi perlu ditempatkan sebagai bagian yang penting dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan daerah, yang mana akan memberikan dampak multiplier efek seperti membuka kesempatan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah sangat tergantung pada besarnya investasi dan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatis untuk membuat perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang baik, mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada calon investor. Pola investasi daerah berfungsi sebagai pembentuk modal untuk pembangunan daerah dalam rangkai mencapai berbagai berbagai tujuan pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pola investasi swasta dan investasi pemerintah (Zaris, 1987). Investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan daerah. Investasi yang ditanamkan hendaknya diarahkan kepada penggunaan yang produktif atau yang dapat meningkatkan output.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu investasi yang bertujuan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing atau investor. PMA didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini memiliki peran yaitu merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan investasi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.

Tabel 5. Data Investasi (Hasil penjumlahan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) Tahun 2002-2018

Tahun	PMA (Rupiah)	PMDN (Rupiah)	Total (Rupiah)
2002	3.422.804.160	146.059.75	3.422.950.220
2003	427.853.267	487.273.70	428.340.541
2004	2.452.025.856	767.121.75	2.452.792.978
2005	23.238.120	876.071,00	24.114.191
2006	6.133.284.300	2.362.637,24	6.135.646.937
2007	1.332.137.364	244.670,64	1.332.382.035
2008	6.696.472.500	121.399,91	6.696.593.900
2009	1.026.221.810	4.506.424,72	1.030.728.235
2010	220.062.465	3.878.822,32	223.941.287
2011	893.198.000	3.900.000,00	897.098.000
2012	5.487.264.708	2.318.863.400	7.806.128.108
2013	4.888.403.676	921.017	4.889.324.693
2014	3.338.356.050	49.495.468	3.387.851.518
2015	3.139.653.414	921.532.660	4.061.186.074
2016	4.965.361.675	3.334.600.000	8.299.961.675
2017	9.551.520.000	1.969.400.000	11.520.920.000
2018	8.270.319.356	3.275.876.300	11.546.195.656

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002-2018)

Penurunan nilai investasi ini disebabkan karena kurangnya dorongan pemerintah untuk menarik investor asing maupun investor lokal untuk menawarkan investasinya di Sulawesi Selatan. Ini mencerminkan bahwa Sulawesi Selatan masih belum menjadi daya tarik bagi para investor-investor asing dan lokal guna untuk menginvestasikan modalnya ke Sulawesi Selatan. Kurang tertariknya para investor asing dan lokal yang menanamkan modal dikarenakan pemerintah belum bekerja secara optimal dan juga kurangnya kepedulian dan perhatian pemerintah dalam hal daerah yang potensi alamnya yang jika dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan akan menarik sejumlah investor-investor asing dan lokal untuk menanamkan modal di daerah atau wilayah wisata tersebut. Pada tahun 2013 nilai investasi mengalami penurunan sekitar 26 persen dari pencapaian nilai investasi tahun 2012. Hal ini disebabkan lantaran sejumlah perusahaan belum menyetorkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang seharusnya disetor setiap enam bulan sekali. Selain itu, sejumlah investor juga terkendala pada proses administrasi yang rumit seperti investor yang ingin membangun smelter di Sulawesi Selatan. Penyebab penurunan nilai investasi lainnya yaitu kesulitan di ketentuan administratif yang ada di daerah. Hal lain yang terjadi yaitu dengan melambatnya pertumbuhan tahunan dana masyarakat yang dihimpun perbankan, penyaluran kredit/pembiayaan dan aset perbankan. Selain itu terjadi penurunan kualitas kredit dimana terjadi kenaikan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan perbankan Sulawesi Selatan akibat kasus *Bail Out* Bank Century yang berdampak sistematis. Pada tahun 2014 nilai investasi mengalami peningkatan kembali, hal ini terjadi bahwa kinerja investasi di Sulawesi Selatan cukup baik. Kinerja investasi menunjukkan indikator mulai berhasilnya berbagai

upaya perbaikan iklim investasi yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi dan memberikan nilai tambah dan daya saing perekonomian. Disisi lain, kinerja investasi menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha kepada provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk yang besar serta meningkatnya jumlah kelas menengah menjadi daya tarik utama bagi kegiatan investasi, disamping terus membaiknya makro ekonomi provinsi Sulawesi Selatan serta peningkatan investasi ini seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi disetiap sektor ekonomi, kredit perbankan yang disalurkan ke masyarakat serta penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan meningkat.

Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya bisa meningkatkan output daerah.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 6. Data Angkatan Kerja yang Bekerja pada Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002- 2018

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)
2002	2.918.149
2003	3.054.774
2004	3.005.369
2005	2.657.854
2006	2.635.415
2007	2.939.463
2008	3.130.111
2009	3.222.256
2010	3.272.365
2011	3.375.498
2012	3.351.908
2013	3.376.549
2014	3.527.036
2015	3.485.492
2016	3.694.712
2017	3.398.663
2018	3.774.924

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2002-2018

Pada tahun 2017 tenaga kerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Sulawesi Selatan lebih memilih untuk bekerja pada sektor pertanian. Secara absolut, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan pada beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor industri dan sektor pertambangan dan penggalian. Kecenderungan penurunan tenaga kerja ini disebabkan oleh lemahnya produktivitas produksi, jual beli, dukungan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum. Sedangkan jika mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya pengembangan investasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mengalami peningkatan signifikan. Namun, pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja kembali meningkat ditandai dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang menyerap banyak tenaga kerja. Peningkatan ini terjadi dengan adanya dukungan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi.

Hasil Estimasi

Dalam sub bab ini akan dibahas hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan *Eviews (Econometric Views)*. *Eviews* adalah program komputer berbasis windows yang banyak dipakai untuk analisis statistika dan ekonometri jenis runtun-waktu (*time series*). Hal ini untuk mengetahui hasil estimasi pengaruh tidak langsung investasi dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2002 hingga tahun 2018 menggunakan model 2SLS. Melalui model ini dapat dilihat hasil yang menunjukkan hubungan tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil estimasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Estimasi Fungsi Investasi, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin

Hubungan Variabel	Constanta	Koefisien	Std.Error	Probabilita	Keterangan
X1 → Y1 → Y2	29.794	-0.011	0.018	0.534	Tidak Signifikan
X2 → Y1 → Y2		-1.512	0.292	0.000	Signifikan

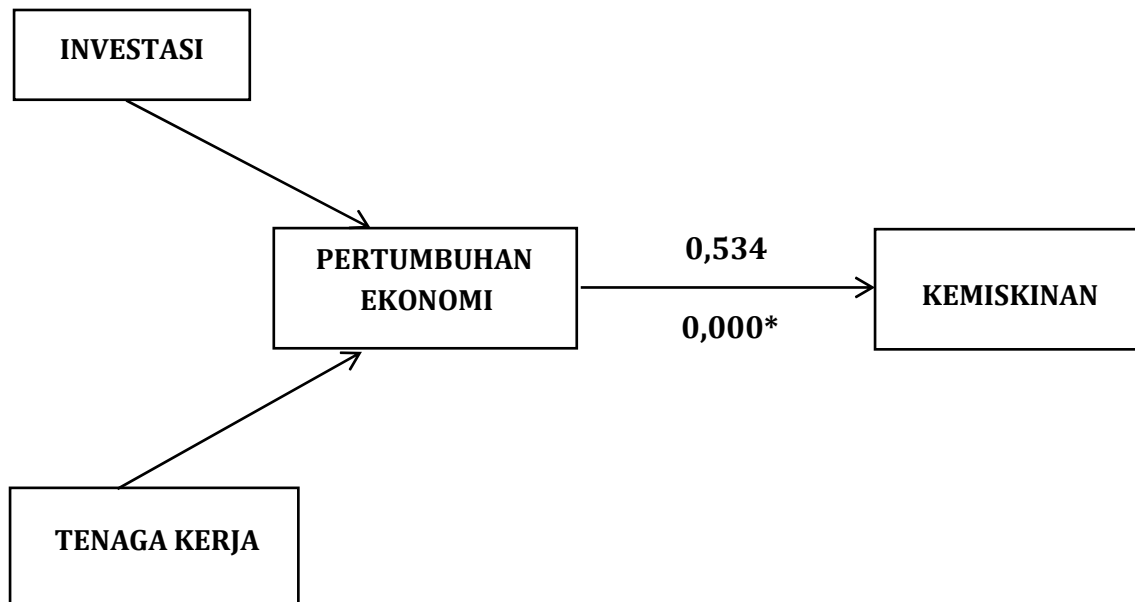
*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$, $R^2 = 0.743\%$; F-statistic = 20.271:
Prob(F-statistic) = 0.000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Program Eviews

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 Jumlah Penduduk Miskin yaitu sebesar 0,743 yang berarti bahwa 74,3 persen variasi perubahan jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 25,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pada tabel menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0,011 dengannilai probabilitas 0.534 lebih besar dari nilai taraf $\alpha = 5$ persen (0.05). Taraf 0,05 adalah 95 persen tingkat kepercayaan probabilitas kesalahan yang masih bisa ditoleransi.

Pada tabel menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -1,512 dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5$ persen (0.05). Hal ini berarti jika tenaga kerja meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,593 persen.



Sumber: Data diolah dengan program Eviews

*) Signifikan

Gambar 1. Hasil Estimasi Model

Pembahasan

Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan data pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa investasi berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Variabel investasi memang menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2002-2018, berbanding terbalik dengan data pertumbuhan ekonomi dimana setiap tahunnya di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika melihat hal tersebut penelitian ini mengidentifikasi bahwa investasi kurang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi, investasi bertanda negatif dan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dilain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai,

adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan (Harrod-Domar). Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penduduk miskin jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan adanya investasi jika penempatan dan alokasinya yang tepat akan mampu menaikkan kesempatan kerja dan membuka banyak lapangan pekerjaan pula serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Terlebih untuk negara berkembang seperti Indonesia, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat dominan adalah faktor investasi, di samping faktor konsumsi. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pertumbuhan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, pertumbuhan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam peningkatan kapasitas produksi. Sehubungan dengan itu, sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi.

Berdasarkan hasil perhitungan data pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi berarti akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah kemiskinan dan dibantu oleh swasta menuai hasil yang baik. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa pendidikan gratis, pengobatan gratis, hingga penetapan tingkat upah yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat.

Hal demikian pun sejalan dengan teori yang dikemukakan Nurkse. Berdasarkan teori, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencari tingkat pembangunan yang pesat. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produksi yang rendah, menyebabkan tingkat kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Keadaan terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan satu negara mengalami kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risky Pratama (2016) yang menyatakan bahwa investasi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Nilai koefisien investasi sebesar -0,226 yang berarti bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila investasi naik sebesar 1 persen maka kemiskinan akan turun sebesar 22,6 persen. Artinya ada hubungan linier antara investasi terhadap kemiskinan.

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Secara Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Tahun 2002-2018

Berdasarkan hasil perhitungan data pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan. Variabel tenaga kerja memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tenaga kerja diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dalam artian dengan adanya peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya yang dibarengi dengan kenaikan nilai investasi yang akan berdampak adanya lapangan pekerjaan baru sehingga memiliki indikasi hubungan ketika tenaga kerja meningkat pengangguran akan berkurang dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Produktivitas tenaga kerja meningkat maka kemiskinan akan menurun walaupun penurunannya tidak drastis. Hal ini menyebabkan bahwa peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pendapatan meskipun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya juga makin meningkat. Sehingga peningkatan produktivitas masyarakat memerlukan tingkat pendidikan. Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Berhubung kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*). Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang menyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibanding dengan individu dengan tidak pendidikan lebih rendah. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di kemudian hari.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetty Agustini (2014) mengenai Pengaruh Investasi (PMA dan PMDN), Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja nilai probabilitas thitung 0,2449 sebesar dengan signifikansi $\alpha = 0,01$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai koefisien 1,602. tenaga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai koefisien sebesar -0,051. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan atau mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Sulawesi Selatan sejatinya lebih mengarah kepada peluang kesempatan kerja baru yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja yang memerlukan skill dan pendidikan tinggi dan pada akhirnya akan menghasilkan output yang maksimal dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu saja akan berdampak kepada pendapatan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Sulawesi Selatan berkurang.

Pengaruh tenaga kerja berpengaruh positif melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Tenaga kerja dalam hal ini perkembangan jumlah angkatan kerja ternyata signifikan pada pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan jumlah kesempatan kerja serta kualitas tenaga kerja di daerah ini perlu menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya angkatan kerja serta mengurangi kemiskinan yang ada di daerah ini.

Saran

Investasi seharusnya diarahkan pada aktivitas industri yang produktif serta prioritas program atau kegiatan pemberdayaan usaha kecil menengah dengan demikian akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong masuknya investasi asing lebih besar lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan guna mempertinggi kualitas tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan bagi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga output meningkat dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan masih sangat besar, hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya mutu layanan kesehatan, gizi, anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mnedapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah dengan kebijakan langsung yang diarahkan kepada peningkatan peran dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat pendapatan rendah, melalui pendapatan rendah dan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan kesehatan dan pendidikan serta pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi. Keberhasilan program menurunkan kemiskinan tidak akan tercapai dengan adanya kerjasama yang baik dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan penambahan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan. Serta memperpanjang periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

REFERENSI

- Agussalim. (2009) *Mereduksi Kemiskinan (Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia)*. Makassar: Nala Cipta Litera
- Badan Pusat Statistik (2012) *Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2003) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2004) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2003*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2005) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2006) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2005*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2006) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2005*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2007) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2008) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2007*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2009) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2008*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2010) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2009*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2011) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2012) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2011*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2013) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2014) *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013*. Makassar: Badan Pusat Statistik

- Badan Pusat Statistik (2015) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2014. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2016) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2015. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2017) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2018) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2019) Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Bappenas. (2004) Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa. Jakarta: Bappenas
- Dariwardani, Ni Made Inna. (2014) Analisis Dinamika (Poverty Dynamic) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(1):1-82
- Deni, S.J. (2016) Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi Indonesia Tahun 2004-2012. *Jurnal Ekonomi*. 28(1):87-99
- Dewi, K.S. (2014) Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dornbusch, R. F. (2004) *Ekonomi Makro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dumairy. (1996) *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Farthing, R. (2010) Health, inequality and child poverty in London. *London Journal of Primary Care*. 3(2):2-4
- Fosu, F. 2010. Growth, Inequality and Poverty Reduction in Developing Countries. Paper WPS. <https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2011/Growth-Inequality.pdf>
- Gravitiani, Evi. 2006. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(1):35-48
- Gregory, M. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastina, F. 2017. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, 3(2):156-166
- Hemli, W.W. 2014. Analisis Pengaruh Belanja Modal daerah, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi*. 3(2):12-25
- Irawan. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: BPFE UGM.

- Jayadi, D.S dan Bata, A.G. (2016) Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012. *Modus*, 28(1):87-99
- Jiang, M. Dan Cheung, C. (2019) Burdens from Educational Expenses on Chinese Children Living in Poverty. *International Journal of Adolescence and Youth*. 15(3):175-192
- Keban. 1994. Determinan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di DIY.
- Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lincoln, A. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Mankiw, G. A (2006) *Principles of Economic*, Mason: South-Western College Publication
- Prasojo, Priyo. (2009). *Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDM, Kesempatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006*. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sulistyowati N. 2011. *Dampak Investasi Sumber daya Manusia Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor: Sekolah Pascasarjana, Bogor
- Sagir, Suharsono. 2000. *Membangun Manusia Karya, Masalah Ketenagakerjaan dan pengembangan SDM*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sukirno. 2001. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Todaro, Michael P . (2006) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.